

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Atas Laporan Keuangan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Per 31 Desember 2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Atas Laporan Keuangan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Per 31 Desember 2023

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR	ii
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	iii
LAPORAN KEUANGAN	
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</i>	1
- LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</i>	2
- NERACA <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</i>	3
- LAPORAN OPERASIONAL <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</i>	4
- LAPORAN ARUS KAS <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</i>	5
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</i>	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
- Rasio Keuangan	<i>Lampiran 1</i>
- Rincian Piutang Layanan Pasien Kerjasama	<i>Lampiran 2</i>
- Rincian Penyisihan Piutang Layanan	<i>Lampiran 3</i>
- Rincian Persediaan Layanan	<i>Lampiran 4</i>
- Rincian Persediaan Non Layanan	<i>Lampiran 5</i>
- Rincian Aset Tetap dan Penyusutannya	<i>Lampiran 6</i>
- Rincian Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya	<i>Lampiran 7</i>
- Rincian Aset Lain-lain	<i>Lampiran 8</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang ☎ (0541) 661013–661015 Kode Pos 75572
Website : www.rsamp.kukarkab.go.id E-mail : rsudamparikesit@yahoo.com



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. dr. Martina Yulianti. Sp.PD, FINASIM, M.Kes(MARS)
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Jalan Ratu Agung No.1, Tlk. Dalam, Kec. Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
2. Laporan keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit telah dimuat secara lengkap dan benar
b. Laporan keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam RSUD Aji Muhammad Parikesit.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS**

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00017/2.1084/AU.5/11/0799-1/1/III/2024

Kepada Yth.

Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT** terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

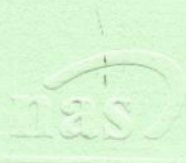
Menurut Opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Rumah Sakit.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS



Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
KHAIRUNNAS
Pimpinan

Drs. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CPL., Asean CPA
Izin Akuntan Publik: 0799



Mataram, 20 Maret 2024

LAPORAN KEUANGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	260.961.049.848	228.605.035.020	87,60	236.299.647.647
Pendapatan hasil kerjasama	889.144.640	804.894.794	90,52	767.222.108
Pendapatan usaha lainnya	7.591.105.717	6.633.193.224	87,38	7.965.855.316
Jumlah	269.441.300.205,00	236.043.123.038	87,60	245.032.725.071
Pegawai	42.349.795.947	39.949.983.931	94,33	37.220.664.348
Barang dan jasa	24.942.678.969	23.908.221.852	95,85	22.129.195.910
Modal	144.855.584.692	136.710.170.384	94,38	13.138.259.699
Jumlah	212.148.059.608	200.568.376.167	94,54	72.488.119.957
Jumlah pendapatan	481.589.359.813,00	436.611.499.205	90,66	317.520.845.028
Belanja pegawai	57.143.653.767	50.531.684.748	88,43	45.991.650.725
Belanja barang dan jasa	315.307.635.235	241.145.130.064	76,48	213.412.282.903
Jumlah	372.451.289.002,00	291.676.814.812	78,31	259.403.933.628
Belanja gedung dan bangunan	229.685.621.494	148.828.894.198	64,80	1.655.028.855
Belanja peralatan dan mesin	194.990.120.834	153.088.601.484	78,51	25.944.083.534
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	13.000.000.000	-	-	1.168.160.100
Belanja aset tetap lainnya	859.593.879	261.488.500	30,42	1.023.097.500
Jumlah	438.535.336.207	302.178.984.182	68,91	29.790.369.989
Jumlah belanja	810.986.625.209	593.855.798.994	73,23	289.194.303.617
SURPLUS (DEFISIT) LRA	(329.397.265.396)	(157.244.299.789)	47,74	28.326.541.411
	329.397.265.396	329.397.265.396	100,00	301.070.723.985
	-	100.000.000.000	-	-
Pembiayaan neto	329.397.265.396	229.397.265.396	69,64	301.070.723.985
SiLPA	-	72.152.965.607		329.397.265.396

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Saldo anggaran lebih awal	329.397.265.396	300.968.059.163	28.429.206.233	9,45
Penggunaan SAL	329.397.265.396	300.968.059.163	28.429.206.233	9,45
Sub total (1)	-	-	-	-
SiLPA/SiKPA sesuai LRA	72.152.965.607	329.397.265.396	(257.244.299.789)	(78,10)
Sub total (2)	72.152.965.607	329.397.265.396	(257.244.299.789)	(78,10)
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	72.152.965.607	329.397.265.396	(257.244.299.789)	(78,10)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

N E R A C A

Per Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	4.3.1	72.050.300.785	329.397.265.396	(257.346.964.611)	(78,13)
Piutang layanan	4.3.2	121.983.899.897	14.890.372.460	107.093.527.437	719,21
Penyisihan piutang tak tertagih	4.3.3	(574.312.280)	(535.987.099)	(38.325.181)	7,15
Persediaan	4.3.4	11.521.625.072	9.932.523.498	1.589.101.574	16,00
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		204.981.513.474	353.684.174.255	(148.702.660.781)	(42,04)
Aset Tetap					
Tanah	4.3.5	465.000.000	465.000.000	-	-
Peralatan dan mesin	4.3.5	497.806.397.205	346.840.923.104	150.965.474.101	43,53
Gedung dan bangunan	4.3.5	340.503.568.361	339.661.702.361	841.866.000	0,25
Jalan, irigasi, dan jaringan	4.3.5	2.829.302.890	2.829.302.890	-	-
Aset tetap lainnya	4.3.5	1.191.991.050	6.218.300	1.185.772.750	19.069,08
Konstruksi dalam pengerjaan	4.3.5	172.218.725.878	531.225.475	171.687.500.403	32.319,14
Akumulasi penyusutan	4.3.5	(351.157.833.483)	(310.864.324.184)	(40.293.509.299)	12,96
<i>Jumlah Aset Tetap</i>		663.857.151.901	379.470.047.946	284.387.103.955	74,94
Aset Lainnya					
Aset tak berwujud	4.3.6	2.896.549.057	1.370.124.267	1.526.424.790	111,41
Aset lain-lain	4.3.7	23.194.266.572	9.362.879.559	13.831.387.013	147,73
Akumulasi amortisasi	4.3.8	(770.539.037)	(371.737.962)	(398.801.075)	107,28
<i>Jumlah Aset Lainnya</i>		25.320.276.592	10.361.265.864	14.959.010.728	144,37
JUMLAH ASET		894.158.941.967	743.515.488.065	150.643.453.903	20,26
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang usaha	4.3.9	-	-	-	-
Belanja yang masih harus dibayar	4.3.10	18.645.180.142	16.344.736.053	2.300.444.089	14,07
Utang jangka pendek lainnya	4.3.11	24.886.244.955	102.664.822	24.783.580.133	24.140,28
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>		43.531.425.097	16.447.400.875	27.084.024.222	164,67
Jumlah Kewajiban		43.531.425.097	16.447.400.875	27.084.024.222	164,67
Ekuitas	4.3.12	850.627.516.870	727.068.087.190	123.559.429.680	16,99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		894.158.941.967	743.515.488.065	150.643.453.903	20,26

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
Kegiatan Operasional					
Pendapatan					
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	4.4.1	235.954.502.088	198.006.522.552	37.947.979.536	19,17
Pendapatan hasil kerjasama	4.4.2	804.894.794	767.222.108	37.672.686	4,91
Pendapatan hibah	4.4.3	-	4.232.022.403	(4.232.022.403)	
Pendapatan APBD	4.4.4	201.585.166.977	74.788.860.661	126.796.306.316	169,54
Pendapatan usaha lainnya	4.4.5	6.633.193.224	3.733.548.048	2.899.645.176	77,66
Jumlah Pendapatan		444.977.757.083	281.528.175.772	163.449.581.311	58,06
Beban					
Beban pegawai	4.4.6	49.822.398.315	46.271.316.031	3.551.082.284	7,67
Beban persediaan	4.4.7	89.031.920.573	71.897.368.730	17.134.551.843	23,83
Beban jasa	4.4.8	134.779.575.031	123.272.553.530	11.507.021.501	9,33
Beban pemeliharaan	4.4.9	13.059.421.658	13.013.878.641	45.543.017	0,35
Beban langganan daya dan jasa	4.4.10	5.243.511.667	4.656.866.196	586.645.471	12,60
Beban perjalanan dinas	4.4.11	1.736.277.597	503.936.347	1.232.341.250	244,54
Beban penyusutan dan amortisasi	4.4.12	41.399.001.112	36.029.893.154	5.369.107.958	14,90
Jumlah Beban		335.072.105.953	295.645.812.629	39.426.293.324	13,34
Surplus/Defisit Operasional		109.905.651.131	(14.117.636.857)	124.023.287.988	(878,50)
Kegiatan Non Operasional					
Surplus/defisit penjualan aset non lancar					
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	3.1.4.13	(6.336.445.432)	4.415.067	(6.340.860.499)	(143.618,67)
SURPLUS/DEFISIT LO		103.569.205.699	(14.113.221.790)	117.682.427.489	(833,85)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus Masuk Kas				
Pendapatan operasional	243.392.590.106	245.032.725.071	(1.640.134.965)	(0,67)
Pendapatan APBD	201.585.166.977	72.488.119.957	129.097.047.020	178,09
Jumlah arus masuk kas	444.977.757.083	317.520.845.028	127.456.912.055	40,14
Arus Keluar Kas				
Belanja pegawai	49.822.398.315	45.991.650.725	3.830.747.590	8,33
Belanja barang dan jasa	243.850.706.526	213.412.282.903	30.438.423.623	14,26
Jumlah arus keluar kas	293.673.104.841	259.403.933.628	34.269.171.213	13,21
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	151.304.652.243	58.116.911.400	93.187.740.843	160,35
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Masuk Kas				
Jumlah arus masuk kas	-	-	-	
Arus Keluar Kas				
Perolehan aset tetap	308.548.952.031	29.790.369.989	278.758.582.042	935,73
Jumlah arus keluar kas	308.548.952.031	29.790.369.989	278.758.582.042	935,73
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(308.548.952.031)	(29.790.369.989)	(278.758.582.042)	935,73
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan				
Arus Masuk Kas				
Jumlah arus masuk kas	-	-	-	
Arus Keluar Kas				
Jumlah arus keluar kas	-	-	-	
Arus kas bersih aktivitas pembiayaan	-	-	-	
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
Arus Masuk Kas				
Penerimaan dana UP/GU/TU dari Kas				
Daerah yang belum dipertanggungjawabkan				
Penerimaan titipan dana BPJS THL dan				
denda keterlambatan pengadaaan BANPER	-	102.664.822	(102.664.822)	
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	38.882.249.083	17.927.264.144	20.954.984.939	
Jumlah arus masuk kas	38.882.249.083	18.029.928.966	20.852.320.117	115,65
Arus Keluar Kas				
Pinjaman Silpa BLUD/Piutang APBD	100.000.000.000		100.000.000.000	-
Penerimaan titipan dana BPJS THL dan denda	102.664.822			
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	38.882.249.083	17.927.264.144	20.954.984.939	116,89
Jumlah arus keluar kas	138.984.913.905	17.927.264.144	121.057.649.761	675,27
Arus kas bersih aktivitas transitoris	(100.102.664.822)	102.664.822	(100.205.329.644)	
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	(257.346.964.611)	28.429.206.233	(285.776.170.844)	(1.005,22)
Saldo awal kas dan setara kas	329.397.265.396	300.968.059.163	28.429.206.233	9,45
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	72.050.300.785	329.397.265.396	(257.346.964.611)	(78,13)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.,FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Ekuitas awal	727.068.087.190	758.618.000.800	(31.549.913.610)	(4,16)
Koreksi Ekuitas	19.990.223.982	(17.436.691.820)	37.426.915.802	(215)
Surplus/defisit-LO	103.569.205.699	(14.113.221.790)	117.682.427.489	(833,85)
EKUITAS AKHIR	850.627.516.870	727.068.087.190	123.559.429.680	16,99

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tenggarong Seberang, 20 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur,

Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit Berbasis Akrual Tahun 2023 adalah:

- 1) Sebagai sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran RSUD A.M. Parikesit, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- 2) Memberikan informasi tentang laporan keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- 3) Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
- 3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171);
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun 2015);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 16 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- 11) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 59 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- 12) Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- 13) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 81 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- 14) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 256/SK-BUP/HK/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong.

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan peraturan tersebut.

Perkembangan PSAP Baru

1. PSAP nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan efektif berlaku per 1 Januari 2021.
2. PSAP nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi Efektif berlaku per 1 Januari 2022.
3. PSAP nomor 17 tentang Properti Investasi Efektif berlaku per 1 Januari 2022.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
- Bab II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
 - 2.1 Sejarah rumah sakit
 - 2.2 Produk layanan
 - 2.3 Tempat kedudukan
 - 2.4 Visi, misi dan tujuan
 - 2.5 Struktur organisasi
 - 2.6 Kepegawaian
- Bab III. Kebijakan Akuntansi
 - 3.1 Entitas pelaporan
 - 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi
- Bab IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan
 - 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 4.3 Neraca
 - 4.4 Laporan Operasional (LO)
 - 4.5 Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Bab V. Penutup

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

2.1 Sejarah Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah A.M Parikesit merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah beroperasi sejak tahun 1983 dengan tujuan melayani kesehatan masyarakat.

Sejak tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2002 RSUD A.M. Parikesit ditetapkan menjadi Badan Pelayanan Kesehatan kemudian pada tahun 2009 RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Departemen Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Menkes nomor 1222/MENKES/SK/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B Non Kependidikan.

Mulai tahun anggaran 2009 sebagaimana dimaksud UU nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 serta Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 180.188/HK-57/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Penerapan PPK-BLUD secara bertahap pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 256/SK-BUP/HK/2014, tanggal 26 April 2014 RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status penuh.

Dengan menerapkan PPK-BLUD diharapkan RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih leluasa dalam merencanakan alokasi sumberdaya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan harapan RSUD A.M. Parikesit dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanannya.

2.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

RSUD A.M. Parikesit bergerak dibidang kesehatan, dengan cakupan layanan di bidang jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit dan dikelola secara profesional, ekonomis, dan etis.

Pembiayaan kegiatan jasa pelayanan kesehatan RSUD A.M. Parikesit diperoleh dari:

- 1) Penerimaan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- 2) Penerimaan subsidi yang berasal baik dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
- 3) Penerimaan hasil kerjasama operasional dengan pihak ketiga lainnya.

Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

- 1) Instalasi Rawat Jalan
 - a) Klinik Kebidanan dan KB;
 - b) Klinik Kandungan
 - c) Klinik Kesehatan Anak;
 - d) Klinik Bedah Anak
 - e) Klinik Bedah
 - f) Klinik Bedah Plastik
 - g) Klinik Orthopedi
 - h) Klinik Kesehatan Jiwa;

- i) Klinik Kulit dan Kelamin;
 - j) Klinik Urologi
 - k) Klinik Onkologi
 - l) Klinik Gigi dan Bedah Mulut;
 - m) Klinik Bedah Mulut
 - n) Klinik THT;
 - o) Klinik Mata;
 - p) Klinik Jantung;
 - q) Klinik Syaraf;
 - r) Klinik Penyakit Dalam
 - s) Klinik Geriatri
 - t) Klinik Paru & Dots
 - u) Klinik VCT.
 - v) Unit GCU
 - w) Unit Endoskopi & Bronkoskopi
 - x) Unit Hemodialisa
 - y) Instalasi Rehab Medis/Fisioterapi
 - z) Instalasi Rawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Inap
- a) VVIP, VIP, Utama;
 - b) Kelas I;
 - c) Kelas II;
 - d) Kelas III;
 - e) ICU/ICCU dan HCU
 - f) Ruang Perawatan Bayi.
 - g) ICU Pasien Covid-19
 - h) Ruang Perawatan Pasien Covid-19
 - i) PICU/NICU
 - j) Ruang VK
 - k) Ruang Maternitas
 - l) Ruang Intermediate**
- 3) Pelayanan Penunjang Medis
- a) Radiologi;
 - b) Laboratorium; dan
 - c) Ambulan.
- 4) Penunjang Non Medis
- a) Instalasi gizi; dan
 - b) Laundry.
- 5) Penunjang Lainnya
- a) Penyelenggaraan pendidikan bagi para calon dokter/perawat;
 - b) Fasilitas parkir;
 - c) Kantin; dan
 - d) Sewa ruangan.

2.3 Tempat Kedudukan

Jl Ratu Agung No. 1 Tenggara seberang, telp. (0541) 661013-661015, website : www.rsamp.kukarkab.go.id e-mail: rsudamparikesit@yahoo.com

2.4 Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

Terwujudnya rumah sakit yang unggul dan terpercaya

Misi:

1. Mengembangkan layanan unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan prima yang dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan;
3. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, humanistik dan partisipatif; dan
4. Menerapkan lean management berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Tata Nilai

1. Berorientasi Pada Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif
8. Rendah Hati

Motto:

Parikesit Pilihan Terbaik

NPWP: 00.294.371.0-728.000

2.5 Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sebagai berikut::

	<u>31-Dec-23</u>	<u>31-Dec-22</u>
Pejabat Pengelola:		
Plt. Direktur	: DR. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M. Kes	dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M. Kes (MARS)
Wakil Direktur Umum dan Keuangan	: Ismi Mufidah, SKM, MPH	Ismi Mufidah, SKM, MPH
Wakil Direktur Pelayanan	: dr. Santi Rini, Sp. BA Subsp.D.A (K)	dr. Mauritz Silalahi, Sp.P,MARS
Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan	: dr. Mauritz Silalahi, Sp.P,MARS	
Dewan Pengawas:		
Ketua	: Drs. Supriyadi, Apt	Imam Pranawa Utama, SKM, MM
Anggota	: Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS	Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS
Anggota Sekretaris	: Sukotjo, SE : Rasyid Ridha, S. ST	Sukotjo, SE Rasyid Ridha, S. ST

2.6 Kepegawaian

	<u>31-Dec-23</u>	<u>31-Dec-22</u>
Terdiri atas:		
PNS	332 orang	348 orang
THL	534 orang	481 orang
BLUD	250 orang	200 orang
Jumlah Pegawai	1116 orang	1029 orang

III. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Berbasis AkruaI berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

3.1 Entitas Pelaporan

1. RSUD A.M. Parikesit dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini RSUD A.M. Parikesit menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit ini sebagai entitas pelaporan tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena terdapat perbedaan kebijakan akuntansi.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akruaI untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Basis akruaI untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan RSUD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kombinasi metode basis kas (*cash basis*) dengan metode basis akrual (*accrual basis*);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset; dan
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

3.4.1 Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

3.4.2 Basis Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional kegiatan RSUD, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi RSUD.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. Dimiliki untuk perdagangan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka.

3.4.3 Kas dan Setara Kas

Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3

Pengakuan

Pada saat diterima atau dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

3.4.4 Piutang Layanan

Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- c. Jangka waktu pelunasan.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

Pengukuran

Sebesar tarif dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada) berdasarkan umur piutang yang lebih dari 1 tahun.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

3.4.5 Piutang Lain-lain

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang/jasa atau uang di luar kegiatan operasional.
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- c. Jangka waktu pelunasan

3.4.6 Cadangan Kerugian Piutang

Cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, diterapkan sebesar :

- a. 0% (nol per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar (dibawah 1 tahun);
- b. 25% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar (diatas 1-2 tahun) setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan (diatas 2-3 tahun) setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada),
- d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet (diatas 3 tahun)

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

3.4.7 Persediaan**Pengertian**

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan saldo persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurang beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

3.4.8 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak RSUD yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional RSUD.

3.4.9 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Belanja dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan Beban RSUD.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Beban RSUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Beban RSUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

3.4.10 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3.4.11 Aset Tetap

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (cost) aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal RSD; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan RSD.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal RSUD menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasikan untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan *review* dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	Aset Tetap	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 1	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 2	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 3	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 9	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1 3 2 31	Senjata Api	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 3	Bangunan Menara	40
1 3 3 4	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 5	Tugu Peringatan	50
1 3 3 6	Candi	50
1 3 3 7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 8	Tugu Peringatan Lain	50
1 3 3 9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1 3 3 10	Rambu-Rambu	50
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 3 4 1	Jalan	10
1 3 4 2	Jembatan	50
1 3 4 3	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1 3 4 5	Bangunan Air Rawa	25
1 3 4 6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 3 4 9	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 10	Bangunan Air	40
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	30
1 3 4 18	Instalasi Gas	30
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20
1 3 4 23	Jaringan Gas	30

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai satuan minimum

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;
- b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas; dan
- c) Aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

- Jika tahun perolehannya tidak diketahui, maka aset tersebut ditaksir sisa masa manfaatnya sesuai dengan kondisi sebagai dasar penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya yang membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

3.4.12 Aset Lainnya

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Masa amortisasi ditetapkan:

Aplikasi komputer : 5 th.

Beban ditangguhkan lainnya : sesuai dengan kondisi.

Apabila diketahui periodisasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.

- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

3.4.13 Basis Pengukuran Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konskuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban RSUD pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh RSUD.

3.4.18 Utang Usaha

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.
- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan krediturnya; dan
- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada), jangka waktu dan tanggal jatuh temponya.

3.4.19 Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pengertian

Merupakan beban jasa yang telah diterima/dinikmati yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur, tarif atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Dirinci per jenis jasa yang harus dibayar.

3.4.20 Ekuitas**Pengertian**

Merupakan hak residual Pemda pemilik RSUD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3.4.21 Pendapatan Jasa Layanan**Pengertian****1. Pendapatan LRA**

Pendapatan RSUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah merupakan pendapatan Negara/Daerah.

RSUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja.

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan RSUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas negara/ Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukaan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan kerja sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA pada RSUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada RSUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada RSUD:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan RSUD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksudkan adalah imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahi.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban RSUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:

- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing dan/ atau
- d. Komisi, potongan

Belanja RSUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk RSUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada RSUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA.

Transaksi pembayaran dapat terjadi pada RSUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi saat pinjaman jangka panjang diterima dan/ atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ atau

Penerimaan pembiayaan pada RSUD diakui pada saat kas yang diterima RSUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada RSUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan RSUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penerimaan RSUD

1. RSUD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mendapatkan dana dukungan dari APBD.
2. Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyarakat sebagai akibat pemberian pelayanan medis merupakan pendapatan dari RSUD. Selanjutnya, semua pendapatan RSUD otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan kedalam
3. RSUD mengakui retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim ke pihak ketiga (BPJS), bukan pada saat RSUD memberikan pelayanan kepada pasien.

Penerimaan RSUD dari JPKMM/BPJS

Pembayaran biaya perawatan medis dari pasien masyarakat miskin yang dibayari oleh pemerintah.

Penggunaan Langsung atas Penerimaan RSUD

Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan RSUD harus dilakukan melalui kas daerah. Namun demikian, jika penerimaan RSUD digunakan langsung untuk keperluan operasional RSUD, maka terlebih dahulu harus berstatus BLUD.

Status organisasi RSUD berstatus BLUD, maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh RSUD yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh RSUD untuk dikondisikan ke dalam LKPD.

2. Pendapatan LO

Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung dan hak kapitasi dalam satu periode.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
- b) Pendapatan Layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerjasama
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f) Pendapatan RSUD lainnya

Pendapatan Dari Layanan Yang Bersumber Dari Masyarakat

Merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan RSUD terdiri dari:

- a) Pendapatan rawat inap;
- b) Pendapatan rawat jalan;
- c) Pendapatan instalasi gawat darurat (IGD);
- d) Pendapatan Radiologi;
- e) Pendapatan farmasi/apotik; dan
- f) Pendapatan lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:

- a) Pendapatan BPJS
- b) Pendapatan Pasien Umum
- c) Pendapatan Jamkesda/Jampersal
- d) Pendapatan Jaminan lainnya
- e) Pendapatan kerjasama instansi/ perusahaan
- f) Pendapatan lainnya

Pendapatan diakui berdasarkan accrual basis, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di kas RSUD. Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pengakuan

1. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima RSD.

2. Pendapatan LO

- Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
- Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.

Pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang di berikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruhnya tagihan piutang dikurang dengan penyisihan piutang.

Pendapatan yang berasal dari BPJS dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.

Penyajian

1. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan operasional untuk setiap jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLk).

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

3.4.22 Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

Pengakuan

1. Pendapatan LO

Pada saat uang atau barang diterima.

Pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima RSUD;

2. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh RSUD.

Penyajian

1. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

2. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

3.4.23 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pengertian

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas kerjasama dengan RSUD.

Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

Pengakuan

Pada saat uang, barang atau jasa diterima, karena tidak terdapat perbedaan material antara basis akrual dan basis kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal sesuai perjanjian kerjasama.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama kerjasama dan pihak ketiga.

3.4.24 Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan belanja modal.
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD. Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D;

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Pendapatan dari APBD/N dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM

Penyajian

Disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D.

3.4.25 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi RSUD. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah antara lain terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh RSUD;
- g) Hasil investasi;
- h) Pendapatan APBD/APBN; dan
- i) Hasil kerja sama.

3.4.26 Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non operasional.

2. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran RSUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

Pengakuan

1. Beban

Pada saat penurunan aset dan/atau timbulnya kewajiban atas transaksi operasional.

Beban (*expense*) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/ defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RSUD.

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

2. Belanja

Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD.

Pengukuran

1. Beban

Sebesar harga perolehan.

Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

2. Belanja

Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

Penyajian

1. Beban

Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.

Beban RSUD A.M. Parikesit diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Langgan Daya & Jasa
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyisihan, Penyusutan Dan Amortisasi
- Beban Bunga

2. Belanja

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

3.4.27 Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

3.4.28 Setor ke Kas Daerah**Pengertian**

Merupakan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pengakuan

Pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pengungkapan

Dasar yang digunakan untuk penyetoran ke Kas Daerah antara lain surat kepala daerah dan analisis likuiditas.

IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan**4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)****4.1.1 Pendapatan**

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan BLUD			
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	260.961.049.848	228.605.035.020	87,60
Pendapatan hasil kerjasama	889.144.640	804.894.794	90,52
Pendapatan usaha lainnya	7.591.105.717	6.633.193.224	87,38
Jumlah	269.441.300.205	236.043.123.038	87,60
Pendapatan Transfer APBD			
Pegawai	42.349.795.947	39.949.983.931	94,33
Barang dan jasa	24.942.678.969	23.908.221.852	95,85
Modal	144.855.584.692	136.710.170.384	94,38
Jumlah	212.148.059.608	200.568.376.167	94,54
Jumlah pendapatan	481.589.359.813	436.611.499.205	90,66

Pendapatan jasa layanan dari masyarakat yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp260.961.049.848,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp228.605.035.020,- atau tercapai 87,6%.

Pendapatan hasil kerjasama yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp889.144.640,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp804.894.794,- atau tercapai 90,52%.

Pendapatan usaha lainnya yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp7.591.105.717,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp6.633.193.224,- atau tercapai 87,38%.

Pendapatan APBD - pegawai yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp42.349.795.947,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp39.949.983.931,- atau tercapai 94,33%.

Pendapatan APBD - barang dan jasa yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp24.942.678.969,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp23.908.221.852,- atau tercapai 95,85%.

Pendapatan APBD - modal yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp144.855.584.692,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp136.710.170.384,- atau tercapai 94,38%.

4.1.2 Belanja

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja operasi			
Belanja pegawai	57.143.653.767	50.531.684.748	88,43
Belanja barang dan jasa	315.307.635.235	241.145.130.064	76,48
Jumlah	372.451.289.002	291.676.814.812	78,31
Belanja modal			
Belanja gedung dan bangunan	229.685.621.494	148.828.894.198	64,80
Belanja peralatan dan mesin	194.990.120.834	153.088.601.484	78,51
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	13.000.000.000	-	-
Belanja aset tetap lainnya	859.593.879	261.488.500	30,42
Jumlah	438.535.336.207	302.178.984.182	68,91
Jumlah belanja	438.535.336.207	593.855.798.994	135,42

Belanja pegawai yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp57.143.653.767,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp50.531.684.748,- atau tercapai 88,43%.

Belanja barang dan jasa yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp315.307.635.235,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp241.145.130.064,- atau tercapai 76,48%.

Belanja modal - gedung dan bangunan yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp229.685.621.494,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp148.828.894.198,- atau tercapai 64,8%.

Belanja modal - peralatan dan mesin yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp194.990.120.834,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp153.088.601.484,- atau tercapai 78,51%.

Belanja modal - jalan, irigasi dan jaringan yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp13.000.000.000,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp0,- atau tercapai %.

Belanja modal - aset tetap lainnya yang dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.264.083.448,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp1.023.097.500,- atau tercapai 80,94%.

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Saldo anggaran lebih awal	329.397.265.396	300.968.059.163	28.429.206.233	9,45
Penggunaan SAL	329.397.265.396	300.968.059.163	28.429.206.233	9,45
Sub total (1)	-	-	-	
SILPA/SIKPA sesuai LRA	72.152.965.607	329.397.265.396	(257.244.299.789)	(78,10)
Sub total (2)	72.152.965.607	329.397.265.396	(257.244.299.789)	(78,10)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	72.152.965.607	329.397.265.396	(257.244.299.789)	(78,10)

4.3 Neraca

4.3.1 Kas dan setara kas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Kas pada BLU				
Kas di Bendahara Penerimaan	42.699.997	39.015.167	3.684.830	9,44
Bank Kaltim no rek 0041421975	24.280.220.277	170.411.287.816	(146.131.067.540)	(85,75)
Bank Kaltim no rek 0049000685 (EDC)	-	18.936.382	(18.936.382)	(100,00)
Bank BCA 8145678966	4.417.638.329	8.928.026.031	(4.510.387.702)	(50,52)
Deposit On Call Bank Kaltimara	-	150.000.000.000	(150.000.000.000)	(100,00)
Bank Mandiri 148003888007	30.405.186.035	-	30.405.186.035	~
Bank BSI 2899999129	2.904.556.148	-	2.904.556.148	~
Deposit On Call Bank BSI	10.000.000.000	-	10.000.000.000	~
<i>Jumlah kas pada BLU</i>	72.050.300.785	329.397.265.396	(257.346.964.611)	(78,13)
Jumlah	72.050.300.785	329.397.265.396	(257.346.964.611)	(78,13)

4.3.2 Piutang Layanan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pasien BPJS Kesehatan/Askes	19.319.973.810	12.970.174.700	6.349.799.110	48,96
Pasien Covid-19	-	-	-	~
Pasien Jampersal Kukar	-	-	-	~
Pasien Jamsostek/BPJS				
Ketenagakerjaan	1.595.564.576	238.768.792	1.356.795.784	568,25
Pasien Kerjasama*)	1.068.361.511	1.681.428.968	(613.067.457)	(36,46)
Pinjaman SILPA BLUD/Piutang APBD	100.000.000.000	-		~
Jumlah	121.983.899.897	14.890.372.460	7.093.527.437	47,64

*) Rincian pada lampiran 2

4.3.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Penyisihan piutang tidak tertagih	(574.312.280)	(535.987.099)	(38.325.181)	7,15

Rincian pada lampiran 3

4.3.4 Persediaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Persediaan layanan:				
Obat-obatan dan BMHP	9.176.236.144	7.919.636.291	1.256.599.853	15,87
Bahan laboratorium	1.058.746.923	977.739.865	81.007.058	8,29
Gas medis	48.810.124	67.644.066	(18.833.942)	(27,84)
Bahan CSSD	89.871.317	89.453.598	417.719	0,47
Bahan radiologi	16.136.960	9.096.960	7.040.000	77,39
Bahan makan dan minum pasien dan pegawai	108.294.422	94.788.093	13.506.329	14,25
Jumlah persediaan layanan	10.498.095.890	9.158.358.873	1.339.737.017	14,63
Persediaan non layanan:				
Alat tulis kantor	209.758.099	285.034.480	(75.276.381)	(26,41)
Barang cetakan	119.736.931	154.536.205	(34.799.274)	(22,52)
Barang habis pakai (BHP Non Medis)	381.832.431	214.900.597	166.931.834	77,68
Alat-alat listrik	11.727.440	13.596.730	(1.869.290)	(13,75)
Bahan kebersihan	94.226.656	106.096.613	(11.869.957)	(11,19)
Bahan Bakar Minyak	206.247.625	-	206.247.625	~
Jumlah persediaan non layanan	1.023.529.182	774.164.625	249.364.557	32,21
Jumlah	11.521.625.072	9.932.523.498	1.589.101.574	16,00

Rincian pada lampiran 4 dan 5

4.3.5 Aset Tetap

Terdiri atas:

Tahun 2023

	Saldo	Tambah	Mutasi	Saldo
	31-Des-22		Kurang	31-Des-23
Biaya perolehan:				
Tanah	465.000.000	-	-	465.000.000,00
Peralatan dan mesin	346.840.923.104	151.734.659.075	769.184.974	497.806.397.204,64
Gedung dan bangunan	339.661.702.361	3.790.352.513	2.948.486.513	340.503.568.361,00
Jalan, irigasi, dan jaringan	2.829.302.890	-	-	2.829.302.890,00
Aset tetap lainnya	6.218.300	1.185.772.750	-	1.191.991.050,00
Kontruksi dalam pengerjaan	531.225.475	171.687.500.403	-	172.218.725.878,00
Jumlah biaya perolehan	690.334.372.130	328.398.284.741	3.717.671.487	1.015.014.985.384

Akumulasi penyusutan:				
Peralatan dan mesin	253.222.771.016	34.656.835.654	706.690.737	287.172.915.933
Gedung dan bangunan	57.228.435.279	6.161.806.046	-	63.390.241.325
Jalan, irigasi, dan jaringan	413.117.889	181.558.336	-	594.676.225
Jumlah akumulasi penyusutan	310.864.324.184	41.000.200.036	706.690.737	351.157.833.483
Jumlah nilai buku	379.470.047.946			663.857.151.901

Rincian pada lampiran 6

4.3.6 Aset Tak Berwujud

Terdiri atas:

Tahun 2023

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Biaya perolehan:				
SIM kepegawaian	174.892.500	-	-	174.892.500
SIM perjalanan	103.285.000	-	-	103.285.000
Website RSUD	39.803.125	-	-	39.803.125
Software Aplikasi Sismadak dengan Lisensi Enterprise	5.583.756	-	-	5.583.756
Software Aplikasi OS Windows Server Standar 2012	9.492.386	-	-	9.492.386
Software Aplikasi OS Windows Server Standar 2012	-	-	-	-
Software Aplikasi Kaspersky Small Office Security	8.470.000	-	-	8.470.000
Software Aplikasi Kaspersky Small Office Security 5 Users + 1 file	2.750.000	-	-	2.750.000
Software Aplikasi Kaspersky Small Office Security 5 Users + 1	2.750.000	-	-	2.750.000
Software Aplikasi Windows Server & SQL	1.023.097.500	-	-	1.023.097.500
Laboratorium Information Sistem RS	-	1.264.936.290	-	1.264.936.290
Core UI Enterprise	-	23.560.000	-	23.560.000
Upgrade Website Official PPID RS	-	89.743.500	-	89.743.500
Aplikasi Android My Parikesit	-	148.185.000	-	148.185.000
Jumlah biaya perolehan	1.370.124.267	1.526.424.790	-	2.896.549.057

Rincian pada lampiran 7

4.3.7 Aset Lain-lain

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Aset non produktif:				
Barang rusak berat	23.179.886.572	9.348.499.559	13.831.387.013	147,95
Barang hilang	14.380.000	14.380.000	-	-
Jumlah	23.194.266.572	9.362.879.559	13.831.387.013	147,73

Rincian pada lampiran 8

4.3.8 Akumulasi Amortisasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Software	770.539.037	371.737.962	398.801.075	107,28

4.3.9 Utang Usaha

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Supplier medis	-	-	-	-

Rincian pada lampiran 9

4.3.10 Belanja yang masih harus dibayar

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Jasa pelayanan	17.345.251.103	14.371.469.409	2.973.781.694	20,69
Langganan:				
Listrik	341.586.400	321.987.100	19.599.300	6,09
Telepon	8.019.801	8.160.873	(141.072)	(1,73)
Air	39.478.900	22.991.300	16.487.600	71,71
Internet dan TV kabel	663.450	660.450	3.000	0,45
<i>Jumlah biaya langganan</i>	389.748.551	353.799.723	35.948.828	10,16
Biaya pegawai:				
TPP PNS Desember	875.213.667	1.316.091.264	(440.877.597)	(33,50)
Uang Makan PNS Desember	-	257.475.000	(257.475.000)	(100,00)
IJK ASN	34.966.821	45.900.657	(10.933.836)	(23,82)
<i>Jumlah biaya pegawai</i>	910.180.488	1.619.466.921	(709.286.433)	(43,80)
<i>Jumlah</i>	18.645.180.142	16.344.736.053	2.300.444.089	14,07

4.3.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Titipan Iuran BPJS THL Bulan Januari 2023	-	87.595.882	(87.595.882)	(100,00)
Titipan denda keterlambatan pengadaan keg. BANPER 2022	-	15.068.940	(15.068.940)	(100,00)
Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD (Pembangunan Gedung 1,2 dan 3)	24.886.244.955	-	24.886.244.955	-
<i>Jumlah</i>	24.886.244.955	102.664.822	24.783.580.133	24.140,28

4.3.12 Ekuitas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Ekuitas awal	727.068.087.190,01	758.618.000.800	(31.549.913.610)	(4,16)
Koreksi ekuitas				
Awal				
Koreksi Piutang Jasa Raharja selisih verifikasi	-	(348.750)	348.750	
Koreksi Piutang PHKT		(4.395.000)	4.395.000	
Koreksi Utang Jaspel 2021		(8.843.845.097)	8.843.845.097	
Koreksi SO Awal Tahun 2021 belum diakomodir pada LKPD sesuai BA Rekon Aset dan Keuangan		(752.438.523)	752.438.523	
Koreksi Piutang BPJS TK		13.325.901	(13.325.901)	
Penyesuaian Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin SK No. 234/SK-BUP/HK/2022		6.636.913.568	(6.636.913.568)	
Penurunan Penyisihan Piutang TW IV 2022		-	-	
Koreksi Mutasi Tanah Keluar ke OPD lain		(14.107.558.313)	14.107.558.313	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Thn 2021		(378.345.606)	378.345.606	
Koreksi BPK 2022 kurang catat persediaan bahan bakar solar	140.023.104	-	140.023.104	
Koreksi Saldo Awal menyesuaikan dgn LK FMIS	(2.396.000)	-	(2.396.000)	
Koreksi Piutang BPJS Kesehatan	(262.718.300)	-	(262.718.300)	
Koreksi Piutang BPJS TK	2.037.270	-	2.037.270	
Koreksi Piutang Madani Talatah Nusantara	302.500	-	302.500	

Koreksi Piutang PPA Academy	3.135.107	-	3.135.107	
Koreksi Piutang Dinas DPPKB	3.618.200	-	3.618.200	
Koreksi Piutang Mergie sesuai surat klarifikasi No. 01/Srt/MA/V/2023	(1.099.068)	-	(1.099.068)	
Koreksi Piutang Mergie tagihan tidak ditanggung	(413.040)	-	(413.040)	
Koreksi Barang Rusak Berat Thn 2022	20.107.734.209	-	20.107.734.209	
Saldo surplus (defisit) tahun berjalan	103.569.205.698,51	(14.113.221.790,00)	117.682.427.489	(833,85)
<i>Ekuitas akhir</i>	850.627.516.870	727.068.087.190	123.559.429.680	16,99

4.4 Laporan Operasional

4.4.1 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pasien BPJS	214.918.624.591	149.806.870.002	65.111.754.589	43,46
Pasien Umum	14.000.302.955	13.866.416.287	133.886.668	0,97
Pasien Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan	2.387.730.148	852.104.185	1.535.625.963	180,22
Pasien Kerjasama	3.422.160.894	7.382.519.878	(3.960.358.984)	(53,65)
Pasien Covid-19 dari Kementerian Kesehatan	1.225.683.500	26.098.612.200	(24.872.928.700)	(95,3)
Jumlah	235.954.502.088	198.006.522.552	37.947.979.536	19,17

4.4.2 Pendapatan Hasil Kerjasama

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Parkir	681.268.000	683.589.700	(2.321.700)	(0,34)
Kerjasama/bagi hasil	123.626.794	83.632.408	39.994.386	47,82
Jumlah	804.894.794	767.222.108	37.672.686	4,91

4.4.3 Pendapatan Hibah

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan BANPER	-	4.232.022.403	-	-
Jumlah	-	4.232.022.403	-	-

4.4.4 Pendapatan APBD

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Subsidi belanja pegawai	39.949.983.931	37.220.664.348	2.729.319.583	7,33
Subsidi belanja barang dan jasa	23.908.221.852	22.129.195.910	1.779.025.942	8,04
Subsidi belanja modal	136.710.170.385	13.138.259.699	123.571.910.686	940,55
Dropping obat program dan BHP Dinkes	1.016.790.809,00	2.300.740.704	(1.283.949.895)	(55,81)
Jumlah	201.585.166.977	74.788.860.661	126.796.306.316	169,54

4.4.5 Pendapatan Usaha Lainnya

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pembakaran sampah	-	24.304.727	(24.304.727)	(100,00)
Laundry	97.664.100	43.781.016	53.883.084	123,07
Kontribusi diklat	467.427.800	315.956.869	151.470.931	47,94
Sewa kantin/gedung/bangunan RS	434.245.958	304.654.505	129.591.453	42,54
Penggantian sarana/prasarana RS oleh pasien/penunggu	7.225.000	4.119.000	3.106.000	75,41
Jasa Giro	5.617.636.466	3.016.325.207	2.601.311.259	86,24
Denda atas keterlambatan pengadaan	-	21.948.884	(21.948.884)	(100,00)
Penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya	8.993.900	2.457.840	6.536.060	265,93
Jumlah	6.633.193.224	3.733.548.048	2.899.645.176	77,66

4.4.6 Beban Pegawai

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Gaji dan tunjangan PNS	22.530.593.944	19.719.974.542	2.810.619.402	14,25
Tambahan penghasilan PNS	16.710.103.554	17.780.355.112	(1.070.251.558)	(6,02)
Honorarium pegawai BLUD	10.581.700.817	8.770.986.377	1.810.714.440	20,64
Jumlah	49.822.398.315	46.271.316.031	3.551.082.284	7,67

4.4.7 Beban Persediaan

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	75.365.092.830	60.081.185.537	15.283.907.293	25,44
Makanan pasien, dokter jaga dan paramedis	5.370.263.364	4.849.929.899	520.333.465	10,73
Alat tulis kantor	844.503.881	663.471.993	181.031.888	27,29
Cetakan	1.318.940.294	1.055.591.127	263.349.167	24,95
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	830.309.876	438.987.613	391.322.263	89,14
Bahan pakai habis non medis	1.362.180.552	1.042.532.001	319.648.551	30,66
Bahan pakai habis medis (gas medis)	3.695.885.987	3.593.882.009	102.003.978	2,84
Alat listrik dan elektronik	1.869.290	1.682.070	187.220	11,13
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	170.106.481	(170.106.481)	(100,00)
Bahan Bakar dan Pelumas	153.868.379	-	153.868.379	~
Beban barang dibawah kapitalisasi	89.006.120	-	89.006.120	~
Jumlah	89.031.920.573	71.897.368.730	17.134.551.843	23,83

4.4.8 Beban Jasa

Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Jasa pelayanan	75.749.297.861	70.887.043.486	4.862.254.375	6,86
Honorarium THL dan pelaksana kegiatan	23.908.221.852	22.129.195.910	1.779.025.942	8,04
Paket/pengiriman	95.532.000	28.451.560	67.080.440	235,77
Penggandaan dan penjiwaan	165.415.752	146.152.240	19.263.512	13,18
Bahan peralatan dan perlengkapan kantor	350.109.525	258.512.300	91.597.225	35,43
Jasa KIR dan STNK	27.256.424	20.287.972	6.968.452	34,35
Jasa kebersihan kantor	6.961.132.578	7.030.161.556	(69.028.978)	(0,98)
Bahan bakar minyak dan Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.283.065.363	558.025.032	725.040.331	129,93
Makanan dan minuman rapat/kegiatan	16.150.500	23.771.316	(7.620.816)	(32,06)
Makanan dan minuman rapat/kegiatan	927.783.500	684.288.000	243.495.500	35,58
Bimbingan teknis dan pelatihan	4.921.963.706	4.110.726.126	811.237.580	19,73
Transportasi dan akomodasi	9.807.420	7.629.400	2.178.020	28,55
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	236.456.103	62.912.200	173.543.903	275,85
Sewa sarana	88.601.941	40.217.800	48.384.141	120,31
Jasa pihak ketiga	13.309.229.207	12.567.467.245	741.761.962	5,90
Jasa General Check Up	58.805.718	66.595.833	(7.790.115)	(11,70)
Peningkatan Imunisasi Sertifikasi	535.335.951	55.115.295	480.220.656	871,30
Belanja penghargaan/hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	181.614.825	11.708.094	169.906.731	
Iklan dan spanduk	294.070.000	124.820.000	169.250.000	135,60
Penyisihan piutang	38.325.181	-	38.325.181	
Jasa transaksi keuangan	802.300	725.000	77.300	10,66
Beban barang di bawah kapitalisasi	-	-	-	-
Penyediaan Penggantian Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan	5.620.597.324	4.458.747.165	1.161.850.159	26,06
Jumlah	134.779.575.031	123.272.553.530	11.507.021.501	9,33

4.4.9 Beban Pemeliharaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Kendaraan dinas operasional	368.186.850	244.998.700	123.188.150	50,28
Perlengkapan gedung kantor	896.149.422	776.585.835	119.563.587	15,40
Alat kesehatan	3.992.486.591	3.676.734.458	315.752.133	8,59
Gedung kantor	6.784.708.115	7.428.098.273	(643.390.158)	(8,66)
Jalan, irigasi, dan jaringan	1.017.890.680	887.461.375	130.429.305	14,70
Jumlah	13.059.421.658	13.013.878.641	45.543.017	0,35

4.4.10 Beban Langganan Daya dan Jasa

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Telepon	100.908.737	110.607.737	(9.699.000)	(8,77)
Air	325.637.600	258.497.900	67.139.700	25,97
Listrik	3.807.200.725	3.549.911.500	257.289.225	7,25
Faksimili/internet/TV kabel	1.009.764.605	733.349.059	276.415.546	37,69
Surat kabar/majalah	-	4.500.000	(4.500.000)	(100,00)
Jumlah	5.243.511.667	4.656.866.196	586.645.471	12,60

4.4.11 Beban Perjalanan Dinas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Perjalanan dinas dalam daerah	349.922.718	200.832.062	149.090.656	74,24
Perjalanan dinas luar daerah	1.386.354.879	303.104.285	1.083.250.594	357,39
Jumlah	1.736.277.597	503.936.347	1.232.341.250	244,54

4.4.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan mesin	34.656.835.654	29.765.083.273	4.891.752.381	16,43
Gedung dan bangunan	6.161.806.046	6.117.639.389	44.166.657	0,72
Jalan, irigasi, dan jaringan	181.558.336	106.846.389	74.711.947	69,92
Software	398.801.076	40.324.103	358.476.973	888,99
Jumlah	41.399.001.112	36.029.893.154	5.369.107.958	14,90

4.4.13 Kegiatan Non Operasional

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Surplus (defisit) penjualan aset non lancar	(6.336.445.432)	-	(6.336.445.432)	~
(Kerugian) penyisihan piutang	-	4.415.067	(4.415.067)	(100)
Kerugian penurunan nilai aset tetap	-	-	-	~
Jumlah	(6.336.445.432)	4.415.067	(6.340.860.499)	(143.618,67)

4.5 Laporan Arus Kas (LAK)

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Arus kas masuk	444.977.757.083	317.520.845.028	127.456.912.055	40,14
Arus kas keluar	293.673.104.841	259.403.933.628	34.269.171.213	13,21
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	151.304.652.243	58.116.911.400	93.187.740.843	160,35

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Arus kas masuk	-	-	-	
Arus kas keluar	308.548.952.031	29.790.369.989	278.758.582.042	935,73
<i>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</i>	(308.548.952.031)	(29.790.369.989)	(278.758.582.042)	935,73
4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan				
Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Arus kas masuk	-	-	-	
Arus kas keluar	-	-	-	
<i>Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan</i>	-	-	-	
4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Arus kas masuk	38.882.249.083	18.029.928.966	20.852.320.117	115,65
Arus kas keluar	138.984.913.905	17.927.264.144	121.057.649.761	675,27
<i>Arus kas bersih dari aktivitas transitoris</i>	(100.102.664.822)	102.664.822	(100.205.329.644)	(97.604,35)
4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)				
Terdiri atas:	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Ekuitas awal	727.068.087.190	758.618.000.800	(31.549.913.610)	(4,16)
Koreksi Ekuitas				
Awal	-	-		
Koreksi Piutang Jasa Raharja selisih verifikasi	-	(348.750)	348.750	
Koreksi Piutang PHKT	-	(4.395.000)	4.395.000	
Koreksi Utang Jaspel 2021	-	(8.843.845.097)	8.843.845.097	
Koreksi SO Awal Tahun 2021 belum diakomodir pada LKPD sesuai BA Rekon Aset dan Keuangan	-	(752.438.523)	752.438.523	
Koreksi Piutang BPJS TK	-	13.325.901	(13.325.901)	
Penyesuaian Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin SK No. 234/SK-BUP/HK/2022	-	6.636.913.568	(6.636.913.568)	
Penurunan Penyisihan Piutang TW IV 2022	-	-	-	
Koreksi Mutasi Tanah Keluar ke OPD lain	-	(14.107.558.313)	14.107.558.313	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Thn 2021	-	(378.345.606)	378.345.606	
Koreksi BPK 2022 kurang catat persediaan bahan bakar solar	140.023.103,76			
Koreksi Saldo Awal menyesuaikan dgn LK FMIS	(2.396.000,00)			
Koreksi Piutang BPJS Kesehatan	(262.718.300,00)			
Koreksi Piutang BPJS TK	2.037.270,00			
Koreksi Piutang Madani Talatah Nusantara	302.500,00			
Koreksi Piutang PPA Academy	3.135.107,00			
Koreksi Piutang Dinas DPPKB	3.618.200,00			
Koreksi Piutang Mergie sesuai surat klarifikasi No. 01/Srt/MA/V/2023	(1.099.068,00)			
Koreksi Piutang Mergie tagihan tidak ditanggung	(413.040,00)			
Koreksi Barang Rusak Berat Thn 2022	20.107.734.208,00			
Surplus/defisit-LO	103.569.205.699	(14.113.221.790)	117.682.427.489	(833,85)
Ekuitas akhir	850.627.516.869	727.068.087.190	123.559.429.679	16,99

V. Praktik Keberlanjutan

RSUD AM. Parikesit berkomitmen untuk menerapkan *green hospital* sebagai wujud dukungan atas inisiatif global untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup di bidang kesehatan dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Dalam pengelolaan lingkungan RSUD AM. Parikesit telah memiliki fasilitas pengolahan limbah yang baik yaitu:

1. IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah), pengolahan limbah cair menggunakan *system anaerot biofilter*
2. Insenerator, peralatan pemusnahan sampah khusus yang bekerja pada suhu tinggi sehingga dapat menghancurkan sampah-sampah berbahaya beracun ataupun sampah-sampah infeksius.
3. TPS Limbah B3, merupakan tempat penyimpanan sementara limbah B3 padat sebelum dimusnahkan oleh Insenerator
4. TPS Umum, merupakan tempat penampungan sementara sampah umum sebelum diangkut ke TPA

Kewajiban pelaporan lingkungan RSUD A.M. Parikesit didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Secara berkala RSUD A.M. Parikesit telah melaporkan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengelolaan Limbah Cair dan Pengelolaan Pencemaran Udara ke Instansi berwenang.

Untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable*), RSUD A.M. Parikesit telah mengembangkan langkah-langkah teknis lebih lanjut seperti:

- a. Hemat listrik, mengefisienkan penggunaan listrik dengan melakukan pengaturan penyalan lampu ruangan, mengganti bola lampu LED, pengaturan suhu ruangan (AC) dan mengatur penempatan pemanas air minum tidak lagi per ruangan tapi per lantai gedung;
- b. Hemat air, mengefisienkan dan mengurangi penggunaan air yang tidak perlu dan mengganti kran air otomatis;
- c. Mengurangi penggunaan kertas, menggantikan secara elektronik atau *online (paperless)* yaitu dengan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. Menyiapkan kantin dan tempat makan bagi karyawan yang lebih sehat dan layak;
- e. Memberikan fasilitas gratis ambulan bagi pasien gawat darurat dan pengantaran pasien paska rawat inap dalam radius 15 Km dari rumah sakit; dan
- f. Menyediakan wisma transit gratis bagi pasien yang sedang menunggu operasi dan keluarga penunggu pasien yang berdomisili di luar Tenggarong.
- g. RSUD A.M. Parikesit telah memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan oksigen untuk pasien di internal rumah sakit, sehingga bisa mereduksi biaya yang sebelumnya dibeli ke pihak luar
- h. RSUD A.M. Parikesit telah melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan menanam 300 bibit pohon di area sekitar rumah sakit, sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi polusi udara disekitar rumah sakit.

RSUD A.M. Parikesit telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan pengelolaan lingkungan. Identifikasi biaya lingkungan tahun 2022 telah dianggarkan dalam rangka kegiatan penyehatan kesehatan lingkungan diantaranya untuk keperluan pengangkutan sampah medis padat, pengangkutan abu insenerator dan biaya kebersihan lingkungan rumah sakit. Biaya lainnya yaitu untuk keperluan pemeriksaan air bersih, pemeriksaan air minum, pemeriksaan air limbah & badan air, pemeriksaan emisi insenerator & genset dan udara ambient dan pemeriksaan penjamah makanan (*Rectal Swab*). Biaya-biaya tersebut masuk dalam kelompok Beban Jasa pada Laporan Operasional. Biaya lingkungan lainnya sehubungan dengan pemeliharaan diantaranya untuk keperluan pemeliharaan IPAL, pembelian Drum Limbah B3, pemeliharaan Insenerator, pemeliharaan pompa air bersih, pemeliharaan instalasi air bersih dan pemeliharaan taman dan jalan. Pada Laporan Operasional, Biaya lingkungan sehubungan dengan pemeliharaan masuk dalam kelompok Beban Pemeliharaan.

RSUD A.M. Parikesit akan terus mencari peluang lainnya untuk berkontribusi pada pembangunan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan.

VI Penutup

Direktur RSUD A.M. Parikesit bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebenaran isi laporan keuangan.

Pejabat pengelola RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2024.

Demikian laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.